



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

JL. KAPTEN SUJONO KOTA BARU JAMBI 36128 36128 08117497779

<https://jambi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

# Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual

No. SK :

## Persyaratan

1. Segala persyaratan mengacu kepada peraturan perundangundangan di bidang kekayaan intelektual.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diarahkan untuk membuat akun untuk melakukan Permohonan sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual;
2. Diarahkan dalam mengisi dan melengkapi data permohonan kekayaan intelektual yang ingin didaftar;
3. Melakukan pemindaian dokumen dengan didampingi oleh pegawai apabila pemohon belum memiliki softcopy dokumen yang dibutuhkan;
4. Mengarahkan Pemohon untuk mengisi data pada SIMPAKI untuk mendapatkan kode billing;
5. Mengarahkan permohonan untuk membayar tagihan sesuai dengan kode billing

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit pelayanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Segala bentuk pengaduan, saran, dan masukan dapat menghubungi melalui: website : [www.pengaduan.dgip.go.id](http://www.pengaduan.dgip.go.id) call center : 152 facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual twitter : [djki\\_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia) Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)

## Pengaduan Layanan



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

JL. KAPTEN SUJONO KOTA BARU JAMBI 36128 36128 08117497779

<https://jambi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. meliputi permohonan pencatatan hak cipta, Permohonan pendaftaran Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Kekayaan Intelektual Komunal, dan Indikasi Geografis

permohonan pasca pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana yang tertera pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.